

RENCANA KERJA 2018



**DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KENDARI, MEI 2017**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sultra Tahun 2018 dibuat dalam rangka penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman penyusunan RAPBD dan RKA-SKPD Tahun 2018.

Penyusunan RENJA 2018 ini, merupakan Rencana Kerja tahun Ke Lima kepemimpinan Gubernur pada periode tahun 2013-2018. dimana di dalamnya memuat program dan kegiatan sesuai yang tertuang pada RPJMD Sulawesi Tenggara Tahun 2013 – 2018 dan Renstra SKPD Dinas Perkebunan dan Hortikultura periode Tahun 2013-2018.

Kami menyadari bahwa apa yang dituangkan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sultra Tahun 2018 ini mungkin masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kelancaran pelaksanaan dari Rencana Kerja yang akan dilaksanakan dalam pembangunan perkebunan dan Hortikultura di Provinsi Sulawesi Tenggara selama tahun 2018.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD ini diucapkan terima kasih.

Kendari, Mei 2017

Kepala Dinas Perkebunan dan
Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara



Dr. Ir. YESNA SUARNI, M.Sc.
NIP. 19640515 199203 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1,2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	24
2.3. Isu-isu Penting Penyeienggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	25
2.4. Review terhadap rancangan Awal RKPD	44
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	46
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	47
3.3 Program dan Kegiatan	48
BAB. IV PENUTUP	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perencanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahunan dituangkan dalam rencana kerja (RENJA) OPD. Substansi Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu kepada RPJM Daerah, RPJP Daerah dan RKP Daerah serta memuat rancangan program dan kegiatan, prioritas pembangunan pertanian, rencana kerja dan pendanaannya baik yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. Rencana kerja memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan pertanian selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara yang harus dilaksanakan secara konsisten

Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun terakhir dari periode kepemimpinan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 –



2018 oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 yang merupakan skema RPJM Daerah 2013 - 2018 atau tindak lanjut dari RKPD tahun 2014 serta Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 - 2018. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 - 2018, memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang akan di capai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh OPD serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya dalam sektor pertanian.

1.1.1. Visi dan Misi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara

Sejalan dengan visi yang merupakan tujuan pembangunan pertanian dan visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah: “**MEWUJUDKAN SULAWESI TENGGARA SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING TAHUN 2013 – 2018**”



Visi Pemerintah Daerah tersebut dijabarkan dalam visi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 - 2018 yakni:

“Kejayaan Perkebunan dan Hortikultura secara Berkelanjutan untuk Mewujudkan Sulawesi Tenggara Sejahtera Mandiri dan Berdaya Saing”.

Visi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut merupakan wujud bentuk harapan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu perlu dijabarkan langkah pelaksanaan untuk mencapainya. Penjabaran langkah yang dimaksud pada hakekatnya akan merupakan serangkaian upaya untuk mendorong berlangsungnya proses perubahan dari kondisi usaha budidaya perkebunan dan hortikultura yang ada sekarang, ke arah penumbuhan terwujudnya sistem dan usaha agribisnis komoditas perkebunan dan hortikultura seperti yang dirumuskan dalam misi.

Untuk mencapai harapan yang terkandung dalam visi pembangunan perkebunan, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan SDM guna mewujudkan sistim perkebunan dan hortikultura yang yang efektif, efisien dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan dan hortikultura yang berdaya saing dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan Kemandirian Kelembagaan Petani.
4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong terwujudnya kemitraan usaha yang sehat, jujur dan berkeadilan;



5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana perkebunan dan hortikultura.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
16. Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perda Prov Sultra No. 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara;



18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018;
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.
20. Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pertanian khususnya perkebunan dan hortikultura antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan perkebunan dan hortikultura di Sulawesi Tenggara.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Dinas, visi dan misi dinas serta kaitannya dengan tujuan pembangunan pertanian yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas 2013 - 2018, dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan tentang regulasi serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018.

1.4 Sistematika

Menguraikan isi bahasan tiap bab dalam Rencana Kerja

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Menjelaskan tentang evaluasi dan target pelaksanaan pembangunan perkebunan dan hortikultura tahun



sebelumnya kondisi dan perkiraan pembangunan program yang akan direncanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Menjelaskan tentang capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah di tentukan dalam SPM sesuai tugas dan fungsi SKPD.

2.3 Isu- isu tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Menjelaskan tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta tujuan sasaran serta program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam Renja SKPD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB. IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut pada Renja SKPD



BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu Terhadap Pencapaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :



A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator Kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator Kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

2.1.1 Evaluasi Program Tahun 2016

Secara umum sasaran program dan kegiatan pada tahun 2016 telah menunjukkan hasil yang cukup baik, ditandai dengan pencapaian beberapa target Kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Secara komprehensif, pencapaian target tahun 2016 ini akan digunakan sebagai rencana/target awal pelaksanaan kegiatan mendukung kepada upaya pencapaian target sasaran RPJMD 2013 – 2018.



Dalam bagian ini akan diuraikan hasil analisis Kinerja kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA SKPD berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja kegiatan sebagaimana yang dikemukakan pada Tabel 1. Pendekatan uraian adalah mengacu kepada sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA SKPD.

2.1.2 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran serta fasilitas pendukung administrasi perkantoran dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang perkebunan dan hortikultura

Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang perkebunan dan hortikultura maka perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas pelayanan, meliputi perbaikan sistem administrasi, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana perkantoran, peningkatan dan kapasitas aparatur. Sehubungan dengan hal ini maka pada tahun 2016 telah dilaksanakan beberapa program kerja meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan, Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD.

Program dan kegiatan di bidang pelayanan administrasi tersebut pada dasarnya dilaksanakan untuk memberikan dukungan kepada kinerja aparatur/SKPD dalam rangka pelaksanaan manajemen, pembinaan, pengembangan dan pembangunan sub sektor perkebunan dan hortikultura. Program dan kegiatan tersebut dapat dibagi berdasarkan



fokus sarannya, yaitu Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Keuangan, dan Bagian Program serta melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi/lembaga terkait.

Bidang pelayanan Umum , kegiatan yang dilaksanakan antara lain meliputi pelayanan jasa surat menyurat , pelayanan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Alat tulis kantor, penyediaan Barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, sedangkan dibidang kepegawaian yaitu pendidikan dan latihan formal..

Bidang Keuangan dan Program dilaksanakan kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dan penyusunan dokumen perencanaan. Sasaran kegiatan tersebut adalah untuk memberikan pelayanan administratif yang dapat secara langsung maupun tidak langsung akan memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PNS baik secara individual maupun kelembagaan.

Bidang pelayanan sarana dan prasarana antara lain dilakukan kegiatan Pembangunan gedung kantor, Pengadaan peralatan gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional dinas, rehabilitasi rumah dinas dan rehabilitasi gedung kantor. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menciptakan kondisi dan iklim kerja yang kondusif dengan dukungan fasilitas kerja yang



memadai sehingga dapat menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan pembangunan serta pengadaan bibit yang bermutu dan berkualitas yang menjadi tugas SKPD.

Secara umum, pelayanan di bidang perkebunan dan hortikultura menunjukkan realisasi yang cukup baik, ditandai dengan berlangsungnya kegiatan administratif secara lancar dan simultan untuk mendukung pelaksanaan tugas pembinaan dan pembangunan perkebunan dan hortikultura. Namun demikian target pelayanan yaitu 100% tidak dapat tercapai secara maksimal karena terdapat beberapa kegiatan teknis yang tidak terlaksana. Adapun faktor yang mempengaruhi Kinerja pelayanan administrasi tersebut adalah penyediaan fasilitas kerja yang kurang memadai peralatan dan perlengkapan kerja, seperti komputer, laptop dan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 operasional lapangan yang sudah berumur tua sehingga kurang mendukung sistim kerja secara optimal.

Untuk memperbaiki dan meningkatkan Kinerja pelayanan administrasi maka kebijakan yang dilakukan pada tahun 2016 adalah melakukan penganggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam sistem administrasi perkantoran dan pembangunan.

2.1.3 Meningkatnya kualitas dan kemandirian kelembagaan petani serta peran lembaga penunjang agribisnis

Salah satu kendala utama petani di Sulawesi Tenggara dalam mengembangkan usahatani adalah terbatasnya modal dan lemahnya



kemampuan akses terhadap sumber permodalan. Untuk meningkatkan posisi daya tawar (bargaining power) petani maka kegiatan pemberdayaan petani dilakukan melalui pendekatan kelompok atau kelembagaan.

Karakteristik utama perkebunan di Sulawesi Tenggara adalah usaha perkebunan tersebut merupakan usahatani rakyat yang dikelola secara konvensional. Sifat spasial dan parsial dalam pengelolaan usaha tani menyulitkan petani untuk berkembang karena skala usaha yang tidak memadai secara ekonomis dan teknis, di samping itu juga menyulitkan pembinaan dan pemberdayaan petani itu sendiri. Pendekatan kelembagaan merupakan salah satu upaya untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan usahatani agar dapat mencapai skala ekonomi.

Untuk meningkatkan kualitas dan kemandirian lembaga petani tersebut maka pada tahun 2016 dilakukan kegiatan pengukuhan dan peningkatan Kemampuan Lembaga Petani, dengan kegiatan pembinaan petani, Inventarisasi Kelembagaan Petani berbasis Perkebunan dan Hortikultura, Peningkatan SDM, dan Penguatan Kelembagaan Petani.

Sasaran utama yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah terbentuknya dan berkembangnya lembaga ekonomi yang mandiri yang mampu menghimpun seluruh kekuatan, potensi dan sumberdaya yang ada di perdesaan dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonomi petani. Kegiatan ini sudah dirintis pada tahun 2008 sampai dengan sekarang dan



akan terus berlanjut dengan sasaran pada daerah sentra produksi komoditas perkebunan dan hortikultura unggulan.

Indikator Kinerja utama yang ingin dicapai adalah terbentuknya Lembaga Ekonomi Masyarakat yang mandiri di pedesaan sebanyak 198 Desa/lokasi mulai tahun 2013 - 2018. Tahun 2016 realisasi tercapai terbentuknya Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera sebanyak 108 Desa/lokasi. Secara jelas disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar nama-nama LEM Sejahtera Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Nama LEM Sejahtera	Kecamatan	Fokus Komoditi
KAB.KONAWE			
1	LEM Sejahtera Epeea	Abuki	Kakao
2	LEM Sejahtera Andomesinggo	Besulutu	Kakao
3	LEM Sejahtera Onembute	Besulutu	Kakao
4	LEM Sejahtera Waworaha	Lambuya	Kakao
5	LEM Sejahtera Silea	Onembute	Kakao
6	LEM Sejahtera Matanggorai	Padangguni	Kakao
7	LEM Sejahtera Atodopi	Padangguni	Kakao
8	LEM Sejahtera Andeposandu	Tongauna	Kakao
9	LEM Sejahtera Anggohu	Tongauna	Kakao
10	LEM Sejahtera Anggotoa	Wawotobi	Kakao
11	LEM Sejahtera Teteona	Wonggeduku	Kakao
KAB. KONSEL			
12	LEM Sejahtera Wunduwatu	Andoolo	Kakao
13	LEM Sejahtera Lapoa Indah	Andoolo	Kakao
14	LEM Sejahtera Anese	Andoolo Barat	Tebu
15	LEM Sejahtera Iwoi Mendoro	Basala	Kakao
16	LEM Sejahtera Tombekuku	Basala	Kakao
17	LEM Sejahtera Epeesii	Basala	Kakao
18	LEM Sejahtera Horodopi	Benua	Kakao
19	LEM Sejahtera Benua Utama	Benua	Kakao
20	LEM Sejahtera Awalo	Benua	Kakao
21	LEM Sejahtera Punggawu-Kawu	Benua	Kakao - Ternak Sapi
22	LEM Sejahtera Asembu Mulya	Buke	Kakao – Kelapa
23	LEM Sejahtera Awunio	Kolono	Kelapa



No	Nama LEM Sejahtera	Kecamatan	Fokus Komoditi
24	LEM Sejahtera Awunio	Kolono	Kakao
25	LEM Sejahtera Kapuwila	Lalembuu	Kakao
26	LEM Sejahtera Mokupa Jaya	Lalembuu	Kakao
27	LEM Sejahtera Atari Jaya	Lalembuu	Kakao
28	LEM Sejahtera Teteinea Jaya	Lalembuu	Kakao
29	LEM Sejahtera Puurema Subur	Lalembuu	Kakao
30	LEM Sejahtera Moramo	Moramo	Kakao
31	LEM Sejahtera Lamara	Benua	Kakao
KAB. KOLAKA TIMUR			
32	LEM Sejahtera Anambada	Dangia	Kakao
33	LEM Sejahtera Wandu	Dangia	Kakao
34	LEM Sejahtera Lembah Subur	Ladongi	Kakao
35	LEM Sejahtera Penanggosi	Lambandia	Kakao
36	LEM Sejahtera Iwoimenggura	Lambandia	Kakao
37	LEM Sejahtera Bou	Lambandia	Kakao
38	LEM Sejahtera Iwoimea Jaya	Lambandia	Kakao
39	LEM Sejahtera AERE	Lambandia	Kakao
40	LEM Sejahtera Wonuambuteo	Lambandia	Kakao
41	LEM Sejahtera Tinete	Lambandia	Kakao
42	LEM sejahtera Ulundoro	Lambandia	Kakao
43	LEM Sejahtera Watuwoha	Lambandia	Kakao
44	LEM Sejahtera Atulano	Lambandia	Kakao
45	LEM Sejahtera Rubia	Lambandia	Kakao
46	LEM Sejahtera Andowengga	Poli-Polia	Kakao
47	LEM Sejahtera Polenga Jaya	Poli-Polia	Kakao
48	LEM Sejahtera Wundubite	Poli-Polia	Kakao
49	LEM Sejahtera Puundokulo	Poli-Polia	Kakao
KAB. KOLAKA UTARA			
50	LEM Sejahtera Lambuno	Katoi	Kakao
51	LEM Sejahtera Koroha	Kodeoha	Kakao
52	LEM Sejahtera Meeto	Kodeoha	Kakao
53	LEM Sejahtera Batuganda	Lasusua	Kakao
54	LEM Sejahtera Totallang	Lasusua	Bawang Merah – Kakao
55	LEM Sejahtera Puurau	Ngapa	Kakao
56	LEM Sejahtera Lalombundi	Ngapa	Kakao
57	LEM Sejahtera Mataiwoi	Ngapa	Kakao
58	LEM Sejahtera Ngapa	Ngapa	Kakao
59	LEM Sejahtera Lawolatu	Ngapa	Kakao
60	LEM Sejahtera Tadaumera	Ngapa	Kakao



No	Nama LEM Sejahtera	Kecamatan	Fokus Komoditi
61	LEM Sejahtera Watumotaha	Ngapa	Kakao
62	LEM Sejahtera Kamisi	Ngapa	Kakao
63	LEM Sejahtera Mikuasi	Ngapa	Kakao
64	LEM Sejahtera Pohnu	Rante Angin	Kakao
65	LEM Sejahtera Awo	Tiwu	Kakao
66	LEM Sejahtera Lapolu	Tiwu	Kakao
67	LEM Sejahtera Nyule	Watunohu	Kakao
KAB. MUNA			
68	LEM Sejahtera Wakobalo Agung	Kabangka	Kakao
69	LEM Sejahtera Sari Mulyo	Kabangka	Kakao
70	LEM Sejahtera Kontumere	Kabawo	Tebu
71	LEM Sejahtera Langkoroni	Maligano	Kakao
72	LEM Sejahtera Lapadindi	Tongkuno	Jambu Mete
73	LEM Sejahtera Fongkaniwa	Tongkuno	Jambu Mete
74	LEM Sejahtera Wansugi	Maligano	Kakao
KAB. MUNA BARAT			
75	LEM Sejahtera Kembar Maminasa	Maginti	Kakao
76	LEM Sejahtera Barakah	Tiworo Selatan	Kakao
77	LEM Sejahtera Kasimpa Jaya	Tiworo Selatan	Kakao
78	LEM Sejahtera Sangia Tiworo	Tiworo Selatan	Kakao
79	LEM Sejahtera Katangana	Tiworo Selatan	Kakao
80	LEM Sejahtera Wansugi	Tiworo Selatan	Kakao
KAB. BOMBANA			
81	LEM Sejahtera Rahadopi	Kabaena	Jambu Mete
82	LEM Sejahtera Tirongkotua	Kabaena	Jambu Mete
83	LEM Sejahtera Pokurumba	Poleang	Kakao – Kelapa
84	LEM Sejahtera Akacipong	Poleang Selatan	Kakao
85	LEM Sejahtera Leboea	Poleang Tengah	Kakao
86	LEM Sejahtera Tampabulu	Poleang Utara	Kakao
87	LEM Sejahtera Lawatuea	Poleang Utara	Kakao
88	LEM Sejahtera Puuwonua	Tontonunu	Kakao
89	LEM Sejahtera Tontonunu	Tontonunu	Kakao
KAB. BUTON			
90	LEM Sejahtera Kumbewaha	Siontapina	Kakao
91	LEM Sejahtera Sumber Sari	Suintapina	Kakao
92	LEM Sejahtera Balobone	Mawasangka	Kelapa
KAB. BUTON UTARA			
93	LEM Sejahtera Karya Mulya	Kulisusu Barat	Kakao
94	LEM Sejahtera Karya Bhakti	Kulisusu Barat	Kakao



No	Nama LEM Sejahtera	Kecamatan	Fokus Komoditi
95	LEM Sejahtera Dampala Jaya	Kulisusu Barat	Kakao
96	LEM Sejahtera Mekar Jaya	Kulisusu Barat	Kakao
97	LEM Sejahtera Soloi Agung	Kulisusu Barat	Tebu
KAB. KONAWE UTARA			
98	LEM Sejahtera Puupi	SAWA	Kakao
KAB. KOLAKA			
99	LEM Sejahtera Lambolemo	Samaturu	Kakao
100	LEM Sejahtera Malaha	Samaturu	Kakao
101	LEM Sejahtera Ulukalo	Samaturu	Kakao
102	LEM Sejahtera Anawua	Toari	Tebu
103	LEM Sejahtera Ranomentaa	Toari	Kakao
104	LEM Sejahtera Langgomali	Wolo	Kakao
105	LEM Sejahtera Lasiroku	Wolo	Kakao
106	LEM Sejahtera Ponrewaru	Wolo	Kakao
107	LEM Sejahtera Samaenre	Wolo	Kakao
108	LEM Sejahtera Wowoli	Toari	Kakao

Diharapkan lembaga yang terbentuk dapat memperkuat posisi petani dalam mengurangi resiko harga dan resiko budidaya sehingga dapat meningkatkan pendapatannya, serta mengembangkan unit-unit pengolahan hasil untuk meningkatkan nilai tambah komoditi dalam skala bisnis yang memadai.

Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan kapasitas kelembagaan diperkuat pula dengan kegiatan penumbuhan kemitraan usaha antara petani/lembaga petani dengan perusahaan. Sasaran utama kegiatan ini adalah berkembangnya kemitraan usaha perkebunan/hortikultura di daerah-daerah sentra produksi.

Pada tahun 2011 telah dilakukan upaya rintisan kemitraan usaha untuk komoditi kakao, dan kemitraan tersebut sampai tahun 2016 masih terjalin dengan baik. Target sasaran kegiatan tersebut adalah difokuskan



pada Kabupaten sentra produksi kakao sebagai penguatan atas pembentukan lembaga ekonomi masyarakat sebagaimana diuraikan di atas. Perusahaan yang bermitra dengan LEM Sejahtera pada bidang usaha komoditi kakao adalah: PT. Core Exhibit Indonesia, PT. Bumi Tangerang Mesindotama, PT. Kalla Kakao Industri, PT. Visi Karya Agritama (AGRIVITION), dan PT. Singenta.

Secara umum indikator Kinerja utama dari sasaran meningkatnya kualitas dan kemandirian kelembagaan petani serta peran lembaga penunjang agribisnis dapat tercapai, ditandai dengan telah terbentuknya lembaga ekonomi masyarakat pada 108 Desa/Lokasi yang diiringi dengan penumbuhan kemitraan usaha di desa sentra produksi perkebunan dan hortikultura di Kabupaten. Pencapaian target Kinerja tersebut diharapkan akan menjadi pijakan pengembangan kelembagaan pada masa yang akan datang.

Program Pembentukan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera ini merupakan program rintisan yang diharapkan akan menjadi penguatan atas program dan kegiatan pembangunan perkebunan dan hortikultura pada seluruh aspek termasuk teknis budidaya, fasilitasi sarana dan prasarana, pengolahan dan pemasaran, serta pemberdayaan petani. Diharapkan kegiatan ini terus dikembangkan dan dimantapkan pada tahun-tahun yang akan datang dengan daerah sasaran yang lebih luas.



2.1.4. Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan dan Hortikultura

Indikator Kinerja utama yang ingin dicapai dalam penetapan sasaran ini adalah peningkatan produksi komoditas perkebunan dan hortikultura. Adapun target Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD dan realisasinya dikemukakan dalam Tabel berikut.

Tabel 2. Target RPJMD 2013 - 2018, Realisasi Tahun 2014 sampai dengan 2016 untuk Produksi Komoditas Perkebunan Unggulan di Sulawesi Tenggara

No.	KOMODITI	TARGET RPJMD (Ton)	PRODUKSI TAHUN 2016 *) (Ton)	PRODUKSI TAHUN 2015 (Ton)	PRODUKSI TAHUN 2014 (Ton)
1	Kakao	180.000	133.764	133.638	161.514
2	Jambu Mete	35.000	29.926	26.902	24.495
3	Kelapa Dalam	50.000	41.368	39.979	41.303
4	Lada	5.000	4.636	4.663	4.378
5	Cengkeh	11.000	14.225	13.571	7.891

*) Angka Sementara

Target RPJMD merupakan target pencapaian kinerja untuk periode 2013- 2018. Pada tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan. Peningkatan produksi tersebut sebagian besar ditunjang oleh besarnya anggaran yang diluncurkan oleh pemerintah baik melalui anggaran APBD maupun APBN.

Kinerja produksi komoditas perkebunan unggulan pada tahun 2016 yaitu kakao, mengalami peningkatan 0.09%, jambu mete naik sebesar 11,24 %, kelapa dalam mengalami kenaikan sebesar 3,47 %, cengkeh



naik sebesar 4,82% sedangkan lada mengalami penurunan sebesar -0,58 %. Tantangan dan permasalahan dalam pengembangan komoditas perkebunan di Sulawesi Tenggara adalah tingkat produktivitas yang masih di bawah produktivitas optimalnya.

Secara umum Kinerja produksi komoditas perkebunan unggulan telah mendekati target RPJMD 2013-2018. Berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk menstimulus peningkatan produksi telah dilakukan pada tahun 2016, dan arah kebijakan pembangunan perkebunan tahun 2016 juga masih difokuskan kepada upaya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan tersebut. Dengan melihat trend peningkatan produksi sebagaimana dikemukakan di atas maka patut diduga bahwa Kinerja produksi perkebunan akan terus mengalami peningkatan secara signifikan walaupun kadang mengalami fluktuasi penurunan, namun demikian diharapkan dapat mencapai target Kinerja dalam RPJMD 2008-2013.

Dalam rangka pencapaian target Kinerja RPJMD 2013-2018 maka beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah Pengembangan Perbenihan/Pembibitan, Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya, Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu, Pengembangan Perlindungan Tanaman Pertanian/Perkebunan, Pelatihan Petani tanaman rempah penyegar, tanaman semusim dan tanaman tahunan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna, Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan, Bintek Peningkatan Produksi,



Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan, Penanganan pasca panen perkebunan dan hortikultura, Pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan dan hortikultura serta pemasaran hasil perkebunan dan hortikultura, pengadaan jalan produksi dan pengembangan sumber air (embung, jaringan irigasi/sumur bor). Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan dukungan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara dan melalui dana APBN. Dana APBN dilaksanakan melalui Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

2.1.4. Meningkatnya Jumlah, Keragaman dan Kualitas Produk Olahan dan Pelayanan Informasi Pasar.

Indikator Kinerja utama yang ingin dicapai dalam penetapan sasaran ini adalah pengembangan unit pengolahan hasil, peningkatan nilai tambah produk, dan peningkatan ekspor komoditas kakao. Untuk mencapai sasaran tersebut di atas maka dilakukan kegiatan Pengembangan Mutu dan Standarisasi, Pengembangan Pemasaran Domestik, dan Pengembangan Usaha dan Investasi dan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian.

Kegiatan pengembangan pemasaran dilakukan kegiatan Analisa dan Publikasi Informasi Pasar di Kabupaten Konawe, Konawe Utara,



Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Muna, Buton, Kota Bau-Bau, Bombana, dan Kota Kendari. Target kinerja yang ingin dicapai adalah tersedianya data informasi pasar komoditas unggulan secara kontinyu dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

2.1.5 Meningkatnya Kemampuan SDM Petani dan Petugas Dalam Rangka Mengembangkan Sektor Perkebunan dan Hortikultura.

Indikator Kinerja utama yang ingin dicapai dalam penetapan sasaran ini adalah peningkatan kapasitas aparatur dengan target 100% dan peningkatan keterampilan petani dan pelaku agribisnis dengan target 100%. Untuk mencapai sasaran tersebut di atas maka dilakukan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Formal, dan pelatihan petani melalui Sekolah Lapang (SL) kakao, Cengkeh dan jeruk siompu, Pelatihan Petani kakao, pelatihan peningkatan mutu kakao, dan pemberdayaan petani tanaman jambu mete.

Target peningkatan kapasitas aparatur belum sepenuhnya dapat tercapai karena realisasi PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal masih sangat rendah. Hal ini terkait dengan kemampuan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Diklat tersebut.

Peningkatan pengetahuan petani dan pelaku usaha melalui kegiatan pelatihan, pendampingan dan bimbingan teknis juga belum sepenuhnya tercapai sesuai target Kinerja yang diharapkan. Hal ini karena untuk merubah sikap, pola pikir, dan pengetahuan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat dan memerlukan pembinaan secara



berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan SDM petani dan pelaku usaha masih sangat diperlukan pada masa-masa yang akan datang.

Berdasarkan perhitungan realisasi Kinerja input dan output masing-masing program berdasarkan sumber dana yang diterima maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tingkat Capaian realisasi kinerja input Dana APBN Prov. Sultra Tahun 2016 adalah sebesar 97,12 %
2. Tingkat Capaian realisasi Kinerja input Dana APBD Prov. Sultra tahun 2016 adalah sebesar 95,84 %.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Penyusunan dan Penetapan SPM, pemerintah wajib menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, sebagai bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah.

Dalam pengukuran Kinerja pencapaian sasaran RPJMD 2013 - 2018 pelayanan SKPD ditentukan oleh beberapa indikator yang menjadi



tolok ukur dalam pencapaian Kinerja Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu :

1. Meningkatnya produksi Sayur-sayuran Cabe besar sebesar 750 Ton dan Bawang merah sebesar 1.000 ton
2. Meningkatnya produksi Buah-buahan:
 - ~ Jeruk → 22.000 ton
 - ~ Durian → 15.000 ton
 - ~ Rambutan → 15.000 ton
 - ~ Sukun → 2.500 ton
3. Meningkatnya produksi Kakao sebesar 180.000 ton
4. Meningkatnya produksi jambu mete sebesar 35.000 ton
5. Meningkatnya produksi cengkeh sebesar 11.000 ton
6. Meningkatnya produksi lada sebesar 5.000 ton

2.3 . Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Kebijakan Pembangunan Perkebunan dan Hortikultura

Berkenaan dengan hal tersebut, maka kebijakan umum pembangunan sistem dan usaha agribisnis berbasis perkebunan adalah sebagai berikut :

- a. Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang baik, kinerja dan hasilnya antara lain : bantuan benih/bibit dan pupuk;
- b. Melanjutkan dan memantapkan kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat, antara lain : LEM Sejahtera;
- c. Mendorong minat investasi dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif;
- d. Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu;



- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas publik good melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur seperti : pembangunan Jalan produksi, dan Jalan Desa.
- f. Menyediakan sarana/ prasarana perkantoran untuk penyelenggaraan pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif.

Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pengembangan agribisnis perkebunan dan hortikultura yang berjalan selama ini, secara umum adalah sebagai berikut:

a. **Sistim perbenihan dan pembibitan belum berjalan optimal.**

Saat ini produktivitas dan kualitas hasil produk perkebunan dan hortikultura masih rendah dan mutunya masih belum bisa bersaing, penyebabnya karena kurang tersedianya benih dan penggunaan benih unggul yang belum maksimal.

Peran benih/bibit sebagai sarana utama agribisnis sangat penting. Agar usaha agribisnis dapat maju dan berkembang, maka sistem dan usaha perbenihan harus tangguh. Sistem perbenihan didukung oleh beberapa subsistem yang terdiri dari : subsistem pengembangan varietas; subsistem perbaikan mutu melalui sertifikasi dan pelabelan; dan subsistem kelembagaan dan peningkatan SDM. Keberhasilan dalam menggerakkan seluruh komponen tersebut sangat dipengaruhi oleh komponen pendukung antara lain lembaga perbenihan, Sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kebijakan pemerintah, sistim informasi dan kesadaran konsumen dalam menggunakan benih bermutu.

Saat ini, infrastruktur perbenihan sulit berkembang karena memerlukan investasi yang cukup besar. Tidak hanya swasta yang mau menanamkan investasi di perusahaan perbenihan/pembibitan.



Sebelum otonomi daerah Balai Benih Hortikultura merupakan instalasi kebun dinas dan setelah otonomi daerah ditingkatkan menjadi UPTD Pemerintah Provinsi, dan BBU yang berada di tingkat kabupaten hampir tidak disentuh dengan anggaran untuk biaya operasionalnya, sehingga di Balai Benih Utama Hortikultura tersebut belakangan ini hampir tidak ada aktivitas yang berarti bagi perbenihan.

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan (UPTD BPSBP), belum lama terbentuk sehingga instalasi ini sampai tahun 2012 belum memiliki gedung operasional sendiri, sehingga aktifitas perbenihan perkebunan belum terlaksana secara optimal seperti yang diharapkan.

Mengacu dari kondisi instalasi perbenihan yang ada saat ini, maka pada lima tahun ke depan diharapkan instalasi UPTD perbenihan perkebunan dan hortikultura tersebut dapat beroperasi secara optimal di dalam melayani masalah perbenihan yang ada sekarang ini.

b. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani.

Usaha pertanian rakyat berskala kecil dan tersebar serta keterbatasannya dalam menyediakan agunan mengakibatkan perbankan kurang berminat untuk membangun jaringan hingga ke pelosok-pelosok desa, sehingga proporsi alokasi dan tingkat penyerapan pembiayaan usaha kecil dibidang perkebunan dan hortikultura relatif rendah. Disisi lain, kelembagaan kelompok usaha tani yang belum solid serta tingkat pendidikan petani yang rendah juga merupakan faktor pembatas dalam menyusun proposal/rencana usaha dan mengelola administrasi keuangan yang merupakan pra syarat dalam pengajuan pinjaman ke



perbankan. Sehingga perlu upaya-upaya untuk mendorong keberpihakan pemerintah dan perbankan agar dapat memberikan kredit program dan kredit komersial berbunga rendah yang disertai dengan memperluas jaringan pelayanan hingga ke pelosok pedesaan.

Untuk itu semua diperlukan juga upaya pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha kelompok, peningkatan kemampuan dalam menyusun rencana usaha dan manajemen pengelolaan keuangan serta penumbuhan, pengembangan kelembagaan keuangan mikro pedesaan, pengembangan KUD maupun koperasi khusus pertanian di pedesaan.

c. Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air yang belum memadai.

Sampai saat ini infrastruktur pertanian seperti :Jaringan irigasi usaha tani, jalan produksi, jalan usahatani, embung, parit masih terbatas keberadaannya belum sepenuhnya menjangkau lahan usahatani perkebunan dan hortikultura di Sulawesi Tenggara. Hal ini disebabkan karena terbatasnya dana dan kemampuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Selain itu tidak tersedianya dana pemeliharaan sehingga menyebabkan infrastruktur yang sudah dibangun kurang terpelihara dan cenderung rusak. Akibatnya upaya peningkatan produktivitas tanaman terbatas dan menyebabkan enggannya investor menanamkan modalnya di Sulawesi Tenggara.

d. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global.

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus



hidrologi dalam bentuk berubah pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan.

Dengan adanya dampak iklim global tersebut maka akan mempengaruhi kalender pola tanam, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan pada akhirnya akan menurunkan produksi hasil tanaman. Untuk itu diperlukan upaya antisipasi daerah rawan banjir dan kekeringan, melakukan pemeliharaan tanaman secara intensif. Kondisi di tingkat lapangan pada umumnya kemampuan petugas dan petani dalam memahami data dan informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas, sehingga kurang mampu menentukan awal musim tanam serta melakukan antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang ada.

e. Produksi dan mutu hasil tanaman perkebunan dan hortikultura masih rendah.

Produktivitas tanaman perkebunan dan hortikultura pada umumnya masih dibawah potensi, karena baru sekitar 20% menggunakan benih unggul, sebagian besar merupakan tanaman tua, dan terbatasnya penerapan teknologi anjuran. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut karena kurangnya kegiatan penyuluhan dan pendampingan untuk mentransfer hasil penelitian dengan kebutuhan di lapangan.

Dengan adanya kondisi tersebut di atas menyebabkan produk perkebunan dan hortikultura yang dihasilkan pada umumnya bermutu rendah, karena penerapan teknologi prapanen, panen dan pasca panen yang belum memadai. Terjadi inefisiensi



dalam proses pengolahan karena tidak terintegrasinya sumber bahan baku dengan unit pengolahan serta kondisi unit pengolahan yang sudah tidak efisien. Selain itu pemanfaatan hasil samping dan limbah perkebunan dan hortikultura belum dilakukan secara optimal sehingga mengurangi peluang untuk memperoleh nilai tambah. Jenis produk perkebunan dan hortikultura yang dihasilkan masih terbatas kepada produk primer dan produk setengah jadi sehingga peluang untuk memperoleh nilai tambah dari produk turunannya belum maksimal.

f. Kelembagaan Petani belum berfungsi optimal

Kelembagaan petani umumnya masih belum berfungsi efektif karena proses pembentukannya bukan atas kesadaran dan kebutuhan petani, melainkan karena adanya fasilitasi oleh pemerintah. Disamping itu kelembagaan ekonomi petani yang ada belum dapat menjalankan aktivitasnya secara optimal karena skala usaha yang tidak ekonomis. Kelembagaan komoditi yang ada, khususnya asosiasi komoditi, belum dapat berperan untuk meningkatkan pengembangan komoditi yang bersangkutan karena kelembagaan tersebut lebih berorientasi pada kegiatan perdagangan untuk kepentingan kelompok. Berbagai peraturan perundangan dan kebijakan belum sepenuhnya mendukung pengembangan perkebunan. Sebagai contoh yaitu adanya pengenaan PPN terhadap komoditas primer, berbagai pungutan



dan retribusi yang memberatkan bagi produsen dan tidak tersedianya dana khusus untuk pengembangan perkebunan..

Kebijakan Pembangunan

Berkenan dengan permasalahan hal tersebut diatas , maka kebijaksanaan umum pembangunan sistem dan usaha agribisnis berbasis perkebunan dan hortikultura adalah sebagai berikut :

- a. Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang baik, kinerja dan hasilnya antara lain : bantuan benih/bibit dan pupuk;
- b. Melanjutkan dan memantapkan kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat, antara lain : LEM Sejahtera;
- c. Mendorong minat investasi dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif;
- d. Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu;
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas masyarakat melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur seperti : pembangunan Jalan produksi, dan Jalan Desa.
- f. Menyediakan sarana/ prasarana perkantoran untuk penyelenggaraan pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif.

Sedangkan kebijakan khusus SKPD Dinas perkebunan dan hortikultura yang merupakan kegiatan keharusan yang harus dilaksanakan setiap tahunnya adalah sebagai berikut :



Kebijakan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Kondisi umum budidaya tanaman perkebunan dan hortikultura yang ada, adalah sebagian besar merupakan usaha perkebunan rakyat skala kecil dengan bobot orientasi pengusahaan masih cenderung kearah produktivitas tanaman yang diusahakan dan belum kearah produktivitas aset usaha tani (lahan dan tenaga petani dan keluarganya). Sejalan dengan visi pembangunan pertanian, maka arah pembangunan perkebunan dan hortikultura ke depan tidak hanya sebatas melanjutkan dan memperluas, tetapi harus pula disertai proses upaya untuk menumbuhkan berlangsungnya proses perubahan ke arah terwujudnya sistem dan usaha agribisnis perkebunan dan hortikultura yang bertumpu kepada minat petani, yang kemudian secara melembaga diikuti tumbuh swakarsa dan swadaya petani untuk menempuh langkah-langkah pelaksanaan terencana, berkelanjutan, dan terus berkembang dalam suatu gerakan yang “mewabah” serempak dan berkelanjutan (pendekatan partisipatif).

Mempertimbangkan perlunya ditempuh perubahan arah orientasi pembangunan perkebunan dan hortikultura ke depan tersebut, dengan sendirinya melekat pula tuntutan perubahan penyelenggaraan tugas dan fungsi jajaran SDM birokrasi sub sektor perkebunan dan hortikultura dibanding periode sebelumnya. Perubahan tersebut yaitu, dari orientasi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang lebih bersifat kearah pelaksanaan kegiatan proyek (pendekatan proyek) lebih menjadi kearah kegiatan



pelayanan fasilitasi, advokasi dan bimbingan. Seperti yang telah Kita maklumi selama ini pengembangan SDM pada era pendekatan proyek lebih bersifat ke arah peningkatan keterampilan khususnya keterampilan dalam mempersiapkan, menyusun design, melaksanakan kemudian memonitoring dan evaluasi proyek. Pendekatan orientasi ini harus pula berubah menjadi lebih kearah kemampuan dan kesiapan pelayanan. Pada pendekatan partisipatif, penyelenggaraan tugas dan fungsi jajaran birokrasi lebin ke arah kesiapan dan kemampuan pelayanan untuk membantu petani dalam memperoleh akses ke berbagai kemudahan yang dibutuhkan.

Mencermati makna terwujudnya proses perubahan orientasi pada penyelenggaraan usahatani maupun tugas dan fungsi jajaran birokrasi yang dimaksud, maka jelas tercermin bahwa kekuatan awal yang sangat menentukan adalah perubahan prilaku dan kesadaran petani dalam mengelola usahatannya serta jajaran birokrasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya untuk membantu dan memfasilitasi petani sehingga berlangsung proses perubahan ke arah terwujudnya sistem usaha agribis berbasis perkebunan dan hortikultura.

Dengan latar belakang singkat seperti tersebut di atas, maka SDM yang terkait secara langsung terhadap proses penyelenggaran pembangunan sub sektor perkebunan dan hortikultura terdiri dari jajaran sub sektor perkebunan serta para petani dan pelaku usaha perkebunan dan hortikultura, Disamping itu secara tidak langsung perlu pula didorong



dan dikondisikan kehadiran pelayanan dari jajaran berbagai fungsi terkait. Berkenaan dengan hal ini maka, kebijakan pengembangan SDM perkebunan dan hortikultura secara garis besar adalah sebagai berikut .

a. SDM Jajaran Birokrasi Sub Sektor Perkebunan dan Hortikultura

- 1). Mensosialisasikan dan menumbuhkan pemahaman kepada seluruh jajaran SDM lingkup sub sektor perkebunan dan hortikultura kedepan dengan pendekatan yang bersifat partisipatif, maka bobot orientasi tugas dan fungsi SDM jajaran sub sektor perkebunan dan hortikultura lebih bersifat pelayanan, pendampingan, fasilitasi dan advokasi dalam kerangka mendorong berlangsungnya proses ke arah terwujudnya SDM perkebunan yang tanggap dan tangguh.
- 2). Mengembangkan kemampuan dan kesiapan pelayanan melalui penumbuhan perilaku pelayanan Serta kesiapan data dan informasi terkait sesuai fungsi masing-masing.
- 3). Mengembangkan sikap prakarsa pro-aktif kepada petani dan pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dan hortikultura dalam mensosialisasikan kerangka pendekatan pembangunan sub sektor perkebunan serta kemudian memfasilitasi, membantu dan membimbing penumbuhan akses kearah berbagai kemudahan pada proses penyelenggaraan kegiatan pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan dan hortikultura.



- 4). Mengembangkan sikap prakarsa pro-aktif kepada berbagai fungsi terkait untuk menumbuhkan prakondisi kehadiran dukungan pelayanan terhadap proses penyelenggara kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan dan hortikultura sesuai fungsi masing-masing pihak terkait.
- 5). Menumbuhkan dan mengembangkan sistem informasi pada setiap unit birokrasi, mencakup kemampuan memperoleh dan menyebarkan informasi yang lengkap mengenai peluang usaha tanaman perkebunan dan hortikultura untuk menjadi acuan dalam upaya mendorong dan menumbuhkan peran serta petani dan masyarakat luas.
- 6). Meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Tuhan YME melalui pembinaan mental spiritual dengan tagline “Sultra Beribadah, Birokrat Beriman, Masyarakat Barokah”.

b. SDM Petani dan Masyarakat

- 1). Menumbuhkan kesadaran petani untuk mengembangkan dan merubah budaya petani dari hanya berorientasi kepada menghasilkan produksi seperti yang berlangsung menjadi kearah pengembangan usahatani dengan pemanfaatan aset usaha secara optimal melalui pengembangan sistem pertanian menggunakan usaha pokok tanaman perkebunan dan hortikultura dengan penerapan kaidah - kaidah sistem pertanian berkelanjutan.



- 2). Memfasilitasi dan mendorong kemampuan petani untuk dapat membaca dan menterjemahkan berbagai peluang usaha terkait yang tersedia sebagai pertimbangan dalam memperkuat/mempertanggung usaha taninya.
- 3). Menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran petani tentang kebersamaan ekonomi untuk dapat mempunyai peluang keberbagai akses kemudahan dalam pengembangan usaha melalui penumbuhan Kelembagaan ekonomi petani yang mampu mewakili kepentingan anggotanya.

Kebijakan Pengembangan Usaha

Dalam rangka pemanfaatan Sumberdaya agribisnis secara optimal, mendukung program pengembangan wilayah, pemberdayaan masyarakat, dan penumbuhan Sentra-Sentra produksi di wilayah khusus, maka kebijakan pengembangan budidaya tanaman perkebunan dan hortikultura disamping melanjutkan pengembangan baru dan penguatan usaha budidaya yang selama ini telah dikembangkan, akan didorong dan difasilitasi pula pengembangan budidaya lainnya yang selama ini belum dikembangkan secara terencana, termasuk pengembangan jenis tanaman spesifik lokasi yang secara ekonomis menguntungkan.

Sejalan dengan ruang lingkup arah pembangunan usaha budidaya tanaman perkebunan dan hortikultura tersebut, maka ditempuh kebijakan sebagai berikut :



a. *Tanaman Tahunan/Rempah penyegar*

- 1). Memfasilitasi penciptaan iklim kelanjutan pengembangan usaha budidaya tanaman tahunan/rempah penyegar, baik jenis-jenis tanaman yang telah dikembangkan selama ini, maupun jenis tanaman lainnya sesuai potensi wilayah, termasuk tanaman lokal spesifik ;
- 2). Mendorong dan mensosialisasikan pemanfaatan Sumberdaya agribisnis secara optimal, khususnya Sumberdaya aset lahan dan tenaga kerja keluarga petani dengan melalui pengembangan sistem pertanian dari usaha pokok tanaman perkebunan dan pengembangan cabang usahatani yang sesuai pada sisa aset lahan, seperti antara lain lahan pekarangan, pangan, batas pemilikan, lahan miring, lahan cadangan dan sisa aset lahan lainnya.
- 3). Memfasilitasi dan menciptakan iklim pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan dan hortikultura untuk mendukung penumbuhan Sentra-Sentra kegiatan ekonomi pada wilayah khusus, wilayah perbatasan dan penyangga (bufferzone) serta wilayah pemekaran
- 4). Meningkatkan upaya penguatan usaha budidaya tanaman tahunan/rempah penyegar perkebunan dan hortikultura, di antaranya melalui penerapan paket teknologi alternatif seperti antara lain pengembangan tanaman sela pangan intensif



berkelanjutan, disertai normalisasi kerapatan tanaman dan pengembangan berbagai cabang usahatani ternak untuk alternatif sumber pupuk serta teknologi tradisional lainnya.

- 5). Memfasilitasi pengembangan prakondisi agar kegiatan sub system dan usaha agribisnis off farm memiliki peluang untuk memperoleh nilai tambah dari kegiatan dan usaha sub sistem pengolahan dan pemasaran hasil.
- 6). Pengembangan budidaya tanaman potensial yang pasarnya prospektif melalui pengembangan kegiatan rintisan pada wilayah-wilayah yang sesuai.
- 7). Meningkatkan upaya pengembangan sistim informasi, dalam rangka menggali jenis-jenis tanaman tahunan yang selama ini belum dikembangkan yang secara teknis sesuai dan secara ekonomis dipandang prospektif, untuk menjadi acuan rintisan upaya pengembangannya.

b. Tanaman Semusim

- 1). Meningkatkan kemampuan pelayanan kesinambungan usaha budidaya tanaman semusim melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai fungsi terkait, yang sesuai untuk masing-masing jenis tanaman.
- 2). Memfasilitasi, mendorong dan mengkonsolidasikan usaha tanaman semusim lainnya yang selama ini pengembangannya



lebih merupakan sebagai usaha swadaya masyarakat, melalui fasilitasi penumbuhan sistim agribisnis.

- 3). Mengintroduksikan budidaya tanaman semusim yaitu tebu melalui pengembangan kegiatan rintisan pada wilayah-wilayah tertentu.
- 4). Memberikan perhatian khusus pada pengembangan usaha tanaman obat-obatan, mengingat Indonesia merupakan Negara terkaya ke - II dalam hal jumlah jenis tanaman obat-obatan, potensi pengembangan cukup luas dan tersebar hampir di seluruh wilayah dan peluang pasarnya cukup prospektif. Perhatian khusus juga diberikan pada pengembangan pengolahan hasil baik pada tingkat rumah tangga maupun tingkat kelompok sesuai dengan tingkat kelayakannya.
- 5). Meningkatkan upaya pengembangan sistim informasi dalam rangka menggali jenis-jenis tanaman semusim yang selama ini belum dikembangkan dan dipandang prospektif, untuk menjadi acuan upaya rintisan pengembangannya.

Kebijakan Investasi Usaha Perkebunan dan hortikultura

Berkembangnya kegiatan pembangunan perkebunan dan hortikultura agar menjadi salah satu, komponen inti dan mendukung upaya pembangunan ekonomi dan pembangunan daerah, maka selain menempuh berbagai upaya untuk meningkatkan peranserta petani, UKM dan masyarakat seluas-luasnya melalui usahatani perkebunan dan



hortikultura pada tingkat petani rakyat, juga meningkatkan investasi sektor dunia usaha pada pengembangan perkebunan dan hortikultura pada skala besar.

Berkenaan dengan hal tersebut maka kebijaksanaan pengembangan investasi usaha perkebunan adalah sebagai berikut :

a. Investasi Usaha Hortikultura dan Perkebunan Rakyat

Untuk pengembangan investasi usaha perkebunan dan hortikultura rakyat ditempuh kebijaksanaan sebagai berikut :

- 1). Mengembangkan sistem informasi, yaitu mencakup kemampuan memperoleh dan menyebar luaskan informasi yang lengkap mengenai peluang usaha tanaman perkebunan guna mendorong dan menumbuhkan minat petani dan masyarakat.
- 2). Fasilitasi, advokasi dan bimbingan dalam memperoleh kemudahan akses untuk pelaksanaan investasi usaha perkebunan.
- 3). Fasilitasi dan advokasi pelaksanaan pengembangan investasi usaha perkebunan dalam rangka keragaan sistem dan usaha agribisnis berbasis komoditi perkebunan

b. Investasi Usaha Hortikultura dan Perkebunan Besar

- 1). Menciptakan iklim investasi yaitu mencakup pengembangan sistem pelayanan prima, penyediaan informasi tentang berbagai dukungan terkait yang diperlukan dalam upaya



mendorong minat investasi dan kelancaran proses administrasi serta bimbingan operasi dan pengembangan usaha.

- 2). Mengembangkan pemberdayaan kelembagaan dan Sumberdaya manusia pelaku usaha tanaman perkebunan dan hortikultura Serta pelayanan penumbuhan kemitraan usaha.

Kebijakan Peningkatan Dukungan Terhadap Pembangunan Sistem Ketahanan Pangan

Dalam kaitannya dengan pengembangan sistem ketahanan pangan, keragaan yang ada menunjukkan bahwa sumber ketersediaan pangan pokok beras masih bertumpu pada lahan irigasi, yang sebagian terbesar di Pulau Jawa, sehingga masalah distribusi sebagai salah satu komponen keterjangkauan pemenuhan kebutuhan pangan oleh setiap keluarga Indonesia merupakan beban yang cukup kompleks. Di lain pihak, Sumberdaya lahan kering cukup besar potensinya dan tersedia di seluruh wilayah, sehingga upaya pengembangan pangan terencana pada lahan kering akan cukup mendukung sistem ketahanan pangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka kebijaksanaan peningkatan dukungan terhadap pembangunan sistem ketahanan pangan adalah sebagai berikut :

- a. Melanjutkan dan mensosialisasikan penerapan paket teknologi alternatif pada kegiatan pengembangan Usaha tanaman perkebunan dan hortikultura, melalui pengembangan cabang usahataninya tumpangsari pangan intensif berkelanjutan. Untuk mendukung upaya penyebaran Sentra-Sentra produksi pangan.



- b. Melanjutkan dan mensosialisasikan kegiatan intensifikasi dan rehabilitasi tanaman kelapa tua Serta pemeliharaan Tanaman Muda/Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), melalui pengembangan cabang usahatani tanaman sela pangan intensif berkelanjutan.
- c. Mengintroduksi paket teknologi alternatif yang dimaksud pada wilayah-wilayah terpencil dan wilayah khusus, baik pada kegiatan pengembangan baru, perneliharaan TBM , maupun intensifikasi dan rehabilitasi kelapa tua.
- d. Melanjutkan dan mensosialisasikan penyediaan sumber pupuk organik pada wilayah pengembangan perkebunan dan hortikultura, melalui kehadiran pelayanan pengembangan, dengan Cara penyediaan kemudahan untuk penangkaran benih.
- e. Memfasilitasi dan mengkondisikan tumbuhnya ketersediaan benih varietas unggul baru secara melembaga pada wilayah-wilayah Sentra produksi perkebunan dan hortikultura, dengan Cara penyediaan kemudahan untuk penangkaran benih.

Dengan gambaran potensi dan peranan seperti dikemukakan tersebut di atas, akan terus dilanjutkan dan diteruskan pengembangan tanaman tumpangsari/sela intensif berkelanjutan sebagai paket teknologi alternative yang terkait langsung dengan pengembangan perkebunan.

Kebijakan Pengembangan Dukungan Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sebagai akibat laju degradasi lahan dan penurunan kualitas lingkungan hidup, yang tidak dapat diimbangi oleh tingkat kemampuan



upaya rehabilitasinya dan kegiatan terkait lainnya, ditambah terus berlangsungnya pemanfaatan lahan melampaui daya dukungnya karena tekanan tuntutan kebutuhan yang terus berkembang maka masalah rehabilitasi lahan dan kualitas lingkungan hidup telah berada pada tingkat yang cukup kritis, sehingga perlu mendapat perhatian dari semua pihak terkait.

Dalam rangka pengembangan dukungan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut ditempuh kebijaksanaan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengembangan penerapan sistem pertanian konservasi pada wilayah-wilayah pengembangan usaha perkebunan dan hortikultura tanaman tahunan sebagai usaha pokok disertai pengembangan cabang usaha tani yang sesuai dan penerapannya menganut kaidah-kaidah konservasi Lahan.
- b. Melanjutkan dan meningkatkan upaya penerapan paket teknologi ramah lingkungan, teknologi tradisional dan teknologi alternative pada kegiatan pengembangan perkebunan dan hortikultura seperti antara lain kegiatan-kegiatan pembukaan lahan, rehabilitasi, pengembangan dan pemeliharaan, intensifikasi usaha tanaman perkebunan serta penerapan pengendalian hama terpadu.
- c. Meningkatkan dukungan upaya rehabilitasi lahan kritis dan mengurangi gangguan terhadap kawasan lindung melalui pengembangan usaha perkebunan dan hortikultura pada wilayah-



wilayah lahan kritis dan pada kawasan penyangga hutan lindung, hutan suaka dan tanaman nasional.

- d. Membantu upaya peningkatan pengertian dan kesadaran untuk penerapan pengembangan teknologi pengolahan limbah industry perkebunan dan hortikultura pengintegrasian biaya lingkungan terhadap biaya produksi dan pengembangan teknologi produksi bersih.
- e. Mendukung upaya untuk terlaksanannya pemantauan yang kontinu, pengawasan dan evaluasi standar mutu lingkungan dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Ada beberapa kegiatan yang direncanakan pada RKPD tahun 2014 tetapi tidak dianggarkan pada DPA tahun 2016 diantaranya:

1. Program pembangunan jalan dan jembatan
2. Program pengembangan dan pengelolaan jalan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
3. Program pembangunan infrastruktur jalan pertanian

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program baik dari Propinsi dan Pusat, Proposal/usulan yang masuk dari Masyarakat antara lain:

- Bantuan bibit tanaman perkebunan dan hortikultura
- Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
- Pengukuhan dan pengembangan LEM Sejahtera



- Pembangunan Jalan Produksi
- Pengadaan sarana dan prasarana produksi perkebunan.



BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja. Pembangunan perkebunan dan hortikultura di Sulawesi Tenggara selama 5 tahun kedepan dalam pelaksanaannya mendapat alokasi anggaran dari Kementrian/Lembaga (KL), yaitu dari Ditjen Perkebunan, Ditjen Hortikultura yang dituangkan dalam beberapa program dan kegiatan sbb :

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu Tanaman Hortikultura berkelanjutan.
 - Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan,
 - Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Florikultura Berkelanjutan,
 - Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Obat Berkelanjutan,
 - Pengembangan Sitim Perbenihan Hortikultura,
 - Pengembangan Sitim Perlindungan Tanaman Hortikultura,
 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura.
2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu Tanaman perkebunan berkelanjutan
 - Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Rempah dan Penyegar,
 - Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Semusim,



- Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Tahunan,
 - Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan,
 - Dukungan Perlindungan Perkebunan,
 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Perkebunan.
3. Program Peningkatan Nilai tambah, daya saing, Industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil perkebunan dan hortikultura.
- Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Standarisasi Pertanian,
 - Pengembangan Pemasaran Domestik,
 - Pengembangan Usaha dan Investasi,
 - Pengembangan Pengolahan dan Hasil Pertanian
 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
4. Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Perkebunan.
- Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian,
 - Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian,
 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal



yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sejalan dengan visi yang merupakan tujuan pembangunan pertanian dan visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah:

“Mewujudkan Sulawesi Tenggara Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing Tahun 2013 - 2018.”

Visi Pemerintah Daerah tersebut dijabarkan dalam visi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara hingga tahun 2018 yakni:

“Kejayaan Perkebunan dan Hortikultura secara Berkelanjutan untuk Mewujudkan Sulawesi Tenggara Sejahtera Mandiri dan Berdaya Saing”.

Visi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut merupakan wujud bentuk harapan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu perlu dijabarkan langkah pelaksanaan untuk mencapainya. Penjabaran langkah yang dimaksud pada hakekatnya merupakan serangkaian upaya untuk mendorong berlangsungnya proses perubahan dari kondisi usaha budidaya perkebunan dan hortikultura yang ada sekarang, ke arah penumbuhan terwujudnya sistem dan usaha agribisnis komoditas perkebunan dan hortikultura demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara seperti yang dirumuskan dalam visi.



Untuk mencapai harapan yang terkandung dalam visi pembangunan perkebunan dan Hortikultura, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sistim Perkebunan dan Hortikultura yang berkelanjutan yang efisien dan berwawasan;
2. Menciptakan kelembagaan petani yang mandiri, inovatif, kreatif untuk menghasilkan produk berdaya saing;
3. Meningkatkan produksi dan mutu produk perkebunan dan hortikultura yang berdaya saing dan mempunyai nilai tambah untuk bahan baku industri;
4. Terciptanya iklim investasi yang kondusif dan mendorong terwujudnya kemitraan usaha yang sehat, jujur dan berkeadilan;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana perkebunan dan hortikultura melalui pendekatan kemitraan

Tujuan yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (2013-2018) adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan produk perkebunan dan hortikultura yang bermutu;
2. Meningkatkan nilai tambah, daya saing, produk perkebunan dan hortikultura di pasar domestik maupun internasional;
3. Meningkatkan dan memantapkan kemandirian kelembagaan petani;
4. Meningkatkan kemampuan petani dan petugas Perkebunan dan Hortikultura.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana perkebunan dan hortikultura melalui pendekatan kemitraan.
6. Mewujudkan penyediaan sarana/prasaranapenunjang kinerja guna pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif



Mengacu pada misi dan tujuan pembangunan sistem dan usaha agribisnis berbasis perkebunan dan hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara, maka sasaran yang ingin dicapai adalah;

1. Meningkatkan produk, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan dan hortikultura yaitu :
 - Kakao dari 148.746 ton menjadi 180.000 ton;
 - Jambu Mete dari 17.720 ton menjadi 35.000 ton.
 - Kelapa dari 42.936 ton menjadi 50.000 ton;
 - Lada dari 3.833 ton menjadi 5.000 ton;
 - Cengkeh dari 6.500 ton menjadi 11.000 ton;
 - Rambutan dari 11 ton menjadi 15.000 ton;
 - Durian dari 5 ton menjadi 15.000 ton.
 - Cabai Rawit dari 4.085,5 ton menjadi 8.736,8 ton;
 - Cabai Besar dari 4.380 ton menjadi 28.566 ton;
 - Bawang Merah dari 199,9 ton menjadi 1.297,11 ton.
2. Meningkatnya nilai tambah, daya saing, produk perkebunan dan hortikultura di pasar domestik maupun internasional;
3. Meningkat dan mantapnya kemandirian kelembagaan petani serta bertambahnya Lembaga Petani (LEM Sejahtera);
4. Meningkatnya kemampuan petani dan petugas Perkebunan dan Hortikultura.
5. Meningkatnya pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana perkebunan dan hortikultura melalui pendekatan kemitraan.
6. Tersedianya sarana/ prasarana perkantoran dan terselenggaranya pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif.



Setelah tujuan dan sasaran ditentukan, maka perlu ditetapkan suatu metode menyangkut cara dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Cara dan strategi ini dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Perkebunan dan Hortikultura tahun 2018. Program kerja Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara pada prinsipnya mengacu pada program umum Departemen Pertanian dan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 7 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 – 2018. dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2013 - 2018. Rincian rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Perkebunan dan Hortikultura tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2 terlampir.

3.3. Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2018, Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara mengajukan 4 Program Nasional yang dibiayai melalui APBN dan 10 program SKPD untuk dibiayai melalui APBD. Program-program tersebut adalah sebagai berikut :

SUMBER DANA APBN

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

- Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Rempah dan Penyegar,
- Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Semusim,



- Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Tahunan,
 - Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan,
 - Dukungan Perlindungan Perkebunan,
 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Perkebunan.
2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan.
- Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Ramah Lingkungan,
 - Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Florikultura Ramah Lingkungan,
 - Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Obat Ramah Lingkungan,
 - Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura,
 - Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan,
 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura.
3. Program Peningkatan Nilai tambah, daya saing, Industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil perkebunan dan hortikultura.
- Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Standarisasi Pertanian,
 - Pengembangan Pemasaran Domestik,
 - Pengembangan Usaha dan Investasi,
 - Pengembangan Pengolahan dan Hasil Pertanian
 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
4. Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Perkebunan.



- Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian,
- Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian,
- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

SUMBER DANA APBD :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 2. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 4. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
 5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 6. Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD
 7. Program Kesejahteraan Petani.
 8. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
 9. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Hortikultura dan Perkebunan
 10. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- Kegiatan yang diusulkan akan dibiayai APBD rincian kegiatannya sbb:
1. Penyediaan Jasa Surat menyurat Kantor.
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 8. Penyediaan Makan dan Minuman.
 9. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.
 10. Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran
 11. Jasa Administrasi Perkantoran.



12. Pembangunan Gedung Kantor
13. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
14. Pengadaan Kendaraan Roda 2 Operasional
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
19. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
20. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.
21. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
22. Pendidikan dan Latihan Formal.
23. Pendidikan/Pelatihan Struktural dan Teknis Fungsional
24. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD.
25. Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun.
26. Penyusunan Rencana Kerja SKPD.
27. Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan.
28. Pembangunan kawasan agrowisata perkebunan dan hortikultura.
29. Pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian/perkebunan
30. Pengadaan alat pasca panen perkebunan dan hortikultura
31. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
32. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
33. Pengendalian OPT Pertanian/Perkebunan
34. Pelatihan Petani pertanian/perkebunan
35. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya
36. Pengolahan Informasi Pasar atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
37. Pameran Hari Kakao Nasional
38. Pameran Sulawesi Expo
39. Pameran Sulawesi Kemilau
40. Pameran Pekan Flori dan Flora Nasional (PF2N)



41. Pameran dalam Rangka HUT RI
42. Pameran dalam Rangka HUT Sultra
43. Gelar Agribisnis PENAS Petani Nelayan.
44. Pelatihan Petani Pelaku Agribisnis
45. Pemberian Penghargaan kepada petani berprestasi
46. Pengukuhan dan pengembangan LEM Sejahtera
47. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis dalam mengadopsi teknologi baru di bidang perkebunan dan hortikultura.
48. Pengadaan Sarana dan Prasarana teknologi Pertanian/Perkebunan tepat guna.
49. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan tepat guna.
50. Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan bercocok tanam.



BAB. IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Dvelopment (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Program Tahunan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara ini merupakan uraian program dan kegiatan yang akan digunakan dan dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018. Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan Kinerja



Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selain itu dengan adanya RENJA diharapkan akan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

TABEL 1
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016

Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2016		Catatan
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)	12
2	2	1	01	02	01	01					
		Usuran Pilihan									
		Bidang Urusan Pertanian									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	94 %	100	100 %	100 %	100,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan yang terkirim	14.860 Surat	6.860 Surat	3.000 Surat	2.500 Surat	83	3.000 Surat	12.360 Surat	83,18
		Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100,00
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlayannya administrasi keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	- Bulan	- Bulan	-	- Bulan	Bulan	100,00
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100,00
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perengkapan dan peralatan kantor selalu siap operasional/pakai	10 Unit/PC	10 Unit/PC	10 Unit/PC	10 Unit/PC	100	10 Unit/PC	10 Unit/PC	100,00
				8 Unit/Laptop	8 Unit/Laptop	8 Unit/Laptop	8 Unit/Laptop	100	8 Unit/Laptop	8 Unit/Laptop	100,00
				2 Unit/Mesin Ketik	2 Unit/Mesin Ketik	2 Unit/Mesin Ketik	2 Unit/Mesin Ketik	100	2 Unit/Mesin Ketik	2 Unit/Mesin Ketik	100,00
				- Unit/Mesa Kursi	- Unit/Mesa Kursi	- Unit/Mesa Kursi	- Unit/Mesa Kursi	-	- Unit/Mesa Kursi	- Unit/Mesa Kursi	0,00
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedia Alat Tulis kantor dalam jumlah yang cukup	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Berbagai dokumen dapat dicetak dan digandakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedia komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100,00
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedia Makanan dan Minuman	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Tersedia Peralatan dan Perlengkapan Kerja	2 Paket	2 Paket	- Paket	- Paket	-	- Paket	2 Paket	100,00
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksana rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100,00
		Jasa Admnistrasi Perkantoran	Terbayarnya jasa administrasi perkantoran	1.128 OB	696 OB	144 OB	144 OB	100	144 OB	984 OB	87,23
		Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban SKPD	12 Bulan	- Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100,00
		Penyusunan Laporan Aset Triwulanan dan Semester SKPD	Terpenuhinya laporan aset SKPD	12 Bulan	- Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2016		Catatan				
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)	12				
2	01	02	01	02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Persentase Pengadaan, pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	%	100	100 %	100 %	100,00	
					Pembangunan Rumah Dinas	Tersedia Rumah Dinas	5 Unit	1 Unit	2 Unit	3 Unit	150	- Unit	4 Unit	80,00	
					Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya gedung kantor	28 Unit/Pkt	25 Unit/Pkt	1 Unit/Pkt	9 Unit/Pkt	900	1 Unit/Pkt	35 Unit/Pkt	125,00	
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	46 Set/Unit	21 Set/Unit	10 Set/Unit	8 Set/Unit	80	33 Set/Unit	62 Set/Unit	134,78	
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedia kendaraan Dinas R-4	1	-	-	-	#DIV/0!	-	0	0,00	
					Pengadaan kendaraan R-2 Operasional	Tersedia kendaraan Dinas R-2	20	-	5	10	200	-	10	50,00	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	4 Dinas	2 Dinas	1 Dinas	- Dinas	-	- Dinas	2 Dinas	50,00	
							UPTD	UPTD	UPTD	UPTD	#DIV/0!	UPTD	0 UPTD		
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan		Unit/R4	15 Unit/R4	Unit/R4	5 Unit/R4	#DIV/0!	4 Unit/R4	24 Unit/R4	100,00	
					Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Terehabnya Rumah Dinas	9 Unit	7 Unit	2 Unit	- Unit	-	- Unit	7 Unit	77,78	
					Rehabilitasi sedang/berat rumah Gedung	Terehabnya gedung kantor	15 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	1 Unit	5 Unit	33,33	
					Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	5 UPTD	3 UPTD	- UPTD	UPTD	-	- UPTD	3 UPTD	60,00	
					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gedung kantor	5 UPTD	3 UPTD	- UPTD	UPTD	-	- UPTD	3 UPTD	60,00	
					Pogram Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pengadaan sarana peningkatan disiplin aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100,00	
					Pengadaan Pakaian Dinas	Tersedianya Pakaian Dinas (Hansip dan Keki), baju Adat Khas Daerah, dan Baju Olahraga	1.100 Pasang	520 Pasang	- Pasang	- Pasang	-	- Pasang	520 Pasang	47,27	
					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu (Pakain Korpri, Adat, Olah	Tersedianya Pakaian Dinas (Hansip dan Keki), baju Adat Khas	520 Pasang	260 Pasang	260 Pasang	- Pasang	-	260 Pasang	520 Pasang	100,00	
2	01	02	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	23 Orang	9 Orang	2 Orang	Orang	-	- Orang	9 Orang	39,13	
					Pendidikan/Latihan Non Formal	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	14 Orang	4 Orang	2 Orang	- Orang	-	- Orang	4 Orang	28,57	
					Pendidikan/latihan Struktural dan Teknik Fungsional	Terikutinya Pelatihan struktural	9 Orang	5 Orang	- Orang	- Orang	-	- Orang	5 Orang	55,56	
2	1	2	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja	Jumlah dokumen pelaporan tahunan	12 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen		2 Dokumen	8 Dokumen	66,67	
					Penyusunan LAKIP	Tersusunnya Laporan LAKIP dan Laporan Keuangan Akhir Tahun	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	5 Dokumen	83,33	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2016		Catatan				
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)	12				
2	01	02	01	07	Penyusunan laporan keuangan akhir Thn	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	5 Dokumen	83,33	
					Program Peningkatan Pengembangan	Jumlah dokumen perencanaan	8 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	-	1 Dokumen	5 Dokumen	62,50	
					Penyusunan RENSTRA SKPD	Tersusunnya Renstra SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	Dokumen	-	- Dokumen	1 Dokumen	50,00	
					Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya Renja SKPD	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	5 Dokumen	83,33	
2	01	02	01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah komoditas yang ditangani dalam rangka peningkatan produksinya	25 Komoditi	24 Komoditi	11 Komoditi	Komoditi	-	11 Komoditi	20 Komoditi	80,00	
					Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Terlaksananya Perluasan dan Intensifikasi untuk peningkatan produksi Produktivitas Tanaman Perkebunan dan Hortikultura	12 Kab	- Kab	- Kab	Kab	-	5 Kab	5 Kab	41,67	
					Pembangunan kawasan agrowisata perkebunan dan hortikultura	Terbangunnya kawasan perkebunan dan Hortikultura	13 Kab.	5 Kab.	2 Kab.	Kab.	-	- Kab.	5 Kab.	38,46	
					Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian/perkebunan	Tersedianya Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (Bibit, Pupuk, pestisida)	71 Pkt	31 Pkt	- Pkt	Pkt	#DIV/0!	- Pkt	31 Pkt	43,66	
					Pengadaan alat pasca panen pertanian/perkebunan	Tersedianya Alat Pasca panen dan pengolahan Sagu	6 Pkt	- Pkt	- Pkt	Pkt	-	- Pkt	- Pkt	0,00	
					Penyuluhan Peningkatan produksi pertanian/perkebunan (SL-PHT Sayuran)	Terkendalinya OPT Hortikultura secara ramah lingkungan (Pestisida Nabati dan Pupuk Organik)	4 Kls	- Kls	- Kls	Kls	-	- Kls	- Kls	0,00	
					Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Tersedianya Bibit Unggul Perkebunan dan Hortikultura	283 Pkt	145 Pkt	28 Pkt	28 Pkt	100,00	25 Pkt	198 Pkt	69,96	
					Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (kebun percontohan perkebunan dan hortikultura/SL-GAP)	Tersedianya Kebun percontohan Hortikultura dan perkebunan -SL-GAP (Buah-2an, Sayuran, tanaman hias, dan Biofarmaka)	17 Kab.	1 Kab.	2 Kab.	Kab.	-	2 Kab.	3 Kab.	17,65	
					Pengendalian OPT Pertanian/perkebunan	Terkendalinya OPT Hortikultura secara ramah lingkungan (Pestisida Nabati dan Pupuk Organik)	17 Kab.	- Kab.	13 Kab.	Kab.	-	13 Kab.	13 Kab.	76,47	
					Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (SL-PHT)	Terlatihnya petani melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama terpadu (SL- PHT) Tanaman Perkebunan dan Hortikultura	- Kelas	- Kelas	- Kelas	Kelas	-	- Kelas	0 Kelas	0,00	
					Pelatihan Petani pertanian/perkebunan	Terlatihnya petani dan petugas mendukung rehabilitasi, peremajaan dan Intensifikasi tanaman perkebunan dan Hortikultura	6 Kelas	- Kelas	- Kelas	Kelas	#DIV/0!	2 Kelas	2 Kelas	33,33	
					Budidaya Jamur Tiram	Pengembangan jamur tiram oleh masyarakat	2 Kelas	2 Kelas	- Kelas	Kelas	-	- Kelas	2 Kelas	100,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2016		Catatan				
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)	12				
2	1	2	1	16	Sosialisasi Undang-Undang Perbenihan	Tersosialisasinya Undang-Undang Perbenihan	1 Kelas	1 Kelas	- Kelas	Kelas	-	- Kelas	1 Kelas	100,00	
					Pertemuan Koordinasi Pengembangan Kwsn Kakao Tk. Provinsi	Pemahaman Pengembangan Kawasan Kakao	1 Kelas	1 Kelas	- Kelas	Kelas	-	- Kelas	1 Kelas	100,00	
					Pertemuan Pengawasan Penanggulangan GUP	Tercegahnya Gangguan Usaha Perkebunan	3 Kelas	1 Kelas	1 Kelas	Kelas	-	1 Kelas	2 Kelas	66,67	
					Pertemuan Pengawasan Benih Perkebunan Ilegal	Tercegahnya peredaran benih ilegal	1 Kelas	1 Kelas	Kelas	Kelas	-	Kelas	1 Kelas	100,00	
					Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Jumlah kelompok yang menjadi percontohan pengembangan teknologi budidaya	9 Klp	10 Klp	- Klp	Klp	#DIV/0!	- Klp	10 Klp	111,11	
					Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya	Terpeliharanya taman kebun PKK Prov, Kebun PPID dan Taman Anggrek	9 Ha/Pkt	10 Ha/Pkt	- Ha/Pkt	Ha/Pkt	#DIV/0!	- Ha/Pkt	10 Ha/Pkt	111,11	
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi program/kegiatan	17 Kab/Kota	8 Kab/Kota	- Kab/Kota	Kab/Kota	-	- Kab/Kota	8 Kab/Kota	47,06	
					Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan	Jumlah promosi hasil produksi perkebunan dan hortikultura yang dilakukan	23 Kali	16 Kali	2 Kali	Kali	-	3 Kali	19 Kali	82,61	
					Pameran dalam daerah dalam rangka HUT Sultra (HALO SULTRA)	Terlaksananya Pameran dalam daerah dalam rangka HUT Sultra selama 5 tahun	3 Kali	3 Kali	- Kali	Kali	#DIV/0!	- Kali	3 Kali	100,00	
					Pameran dalam daerah dalam rangka Ulang Tahun R.I	Terlaksananya Pameran dalam daerah dalam	4 Kali	2 Kali	1 Kali	Kali	-	- Kali	2 Kali	50,00	
					Pameran Luar Daerah Sulawesi Expo	Terlaksananya Pameran Sulawesi Expo	3 Kali	3 Kali	Kali	Kali	#DIV/0!	Kali	3 Kali	100,00	
					Pameran Luar daerah Sulawesi Kemilau	Terlaksananya Pameran Sulawesi Kemilau	1 Kali	1 Kali	- Kali	Kali	-	- Kali	1 Kali	100,00	
					Pameran Luar Daerah hari Ketahanan Pangan	Terlaksananya Pameran Luar Daerah hari Ketahanan Pangan	2 Kali	2 Kali	- Kali	Kali	#DIV/0!	- Kali	2 Kali	100,00	
					Pameran Pekan Flori dan Flora Nasional (PF2N)	Terlaksananya Pameran Pekan Flori dan Flora	2 Kali	2 Kali	- Kali	Kali	-	- Kali	2 Kali	100,00	
					Pameran The 19th Salon du Chocolat 2013/pameran luar negeri	Terlaksananya Pameran The 19th	1 Kali	1 Kali	- Kali	Kali	-	- Kali	1 Kali	100,00	
					2	1	2	1	17	Pameran Hari Kakao Nasional	Terlaksananya Pameran Hari Kakao Nasional	2 Kali	1 Kali	- Kali	Kali
Gelar Agribisnis PENAS Petani Nelayan	Terlaksananya Gelar Agribisnis PENAS	2 Kali	1 Kali	- Kali						Kali	-	- Kali	1 Kali	50,00	
Promosi Hasil-hasil Perkebunan dan Hortikultura	Terlaksana promosi hasil perkebunan	3 Kali	- Kali	1 Kali						Kali	-	3 Kali	3 Kali	100,00	
Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan masyarakat	Tersedianya Jaringan Sistim Informasi pasar	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota						Kab/Kota	-	0 Kab/Kota	17 Kab/Kota	100,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2016		Catatan	
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)	12	
2 01 02 01 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan pembinaan petani/pelaku agribisnis terkait upaya peningkatan kesejahteraan petani	100% % 4.100 Orang	51,22 % 2.100 Orang	2,44 % 100 Orang	% Orang	-	2,44 % 100 Orang	53,66 % 2.200 Orang	53,66 53,66		
		Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	9 Kelas	Kelas	- Kelas	- Kelas	-	- Kelas	- Kelas	0,00		
		Pemberian penghargaan kepada petani berprestasi	7 Orang	- Orang	- Orang	- Orang	-	- Orang	- Orang	0,00		
		Pengukuhan dan pengembangan LEM Sejahtera	10 LEM	- LEM	- LEM	- LEM	-	- LEM	- LEM	0,00		
		Pelatihan petani dan pelaku agribisnis untuk penerapan teknologi baru dibidang	3 Kelas	1 Kelas	1 Kelas	- Kelas	-	- Kelas	1 Kelas	33,33		
		Peningkatan kemampuan lembaga petani	17 Kelas	2 Kelas	5 Kelas	- Kelas	-	8 Kelas	10 Kelas	58,82		
		Pelatihan Petani Peningkatan Mutu Kakao	116 Kelas	96 Kelas	- Kelas	- Kelas	-	- Kelas	96 Kelas	82,76		
		Sosialisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan	43 Desa	9 Desa	17 Desa	- Desa	-	- Desa	9 Desa	20,93		
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	- Kab/Kota	-	- Kab/Kota	17 Kab/Kota	100,00		
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah UPTD yang memiliki akses jalan permanen	3 UPTD	3 UPTD	UPTD	UPTD	-	UPTD	3 UPTD	100,00	
		Pembangunan Jalan	Terbangunan Jalan masuk	3 UPTD	3 UPTD	0% UPTD	UPTD	-	- UPTD	3 UPTD	100,00	
		Program Pengembangan dan Pengeloaan jaringan Irigasi, Rawa	Jumlah UPTD yang memiliki jaringan air bersih	2 UPTD	2 UPTD	UPTD	UPTD	-	UPTD	2 UPTD	100,00	
		Pembangunan Jaringan Air bersih/air minum	Terbangunan Jaringan Air bersih/air minum bidang perkebunan dan hortikultura	2 UPTD	2 UPTD	0% UPTD	UPTD	-	- UPTD	2 UPTD	100,00	
		Program Pembangunan Infrastruktur	Panjang jalan produksi	48,82 Km	48,82 Km	- Km	Km	-	- Km	48,82 Km	100,00	
		Pembangunan Jalan Produksi	Tersedianya jalan produksi perkebunan	48,82 Km	48,82 Km	- Km	Km	-	- Km	48,82 Km	100,00	
2 1 2 1 18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan Tepat Guna	Jumlah paket penyediaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	44 Paket	13 Paket	6 Paket	Paket	-	2 Paket	15,00 Paket	34,09		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	14 Paket	13 Paket	2 Paket	Paket	-	- Paket	13,00 Paket	92,86		
		Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	12 Kelas	- Kelas	4 Kelas	Kelas	-	2 Kelas	2,00 Kelas	16,67		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2016		Catatan
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)	12
	Agroindustri Pedesaan (Pupuk Organik, Agensia Hayati, Pengolahan Kakao, Kelapa, Kopi, dll)	Terlaksananya agroindustri di pedesaan (pupuk organik, Agensia Hayati, Pengolahan Kakao, Kelapa, Kopi dll)	10 Paket	- Paket	- Paket	Paket	-	- Paket	- Paket	0,00	
	Pelatihan Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan Bercocok Tanam	Terlaksananya Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan Bercocok Tanam	8 Kelas	- Kelas	- Kelas	Kelas	-	- Kelas	- Kelas	0,00	

TABEL 2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

SKPD : DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA

Kode	Usuran/Bidang urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.000) Tahun 2018	Perkiraan Maju (Rp.000) Tahun 2019	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD 1 / 2 / 3	Jenis Kegiatan a / b / c
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2 2 01 2 01 02 2 01 02 01 01	URUSAN PILIHAN Bidang Pertanian Sub-Sub Bidang Perkebunan										11.179.215	13.371.645		
2 01 02 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prioritas I	Penyediaan sarana/prasarana penunjang kinerja guna pelaksanaan administrasi perkantoran	Kendari	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%							Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sultra	a
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kendari			Jumlah surat masuk dan yang terkirim	3.000 Surat	Surat masuk dan keluar yang terkirim	2.000 Surat	13.430	14.774		a
	2. Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber daya Air Listrik			Kendari			Terlaksananya penyediaan jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	12 Bulan	Tersedia penyediaan jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	12 Bulan	284.350	312.785		a
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kendari			Terlayannya Administrasi Keuangan SKPD	-	Tersedia jasa Administrasi Keuangan SKPD	-				a
	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor.			Kendari			Terjaganya kebersihan kantor	12 Bulan	Terjaganya kebersihan kantor	12 Bulan	14.641	16.105		a
	5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Kendari			Perengkapan dan peralatan kantor selalu siap operasional/ pakai	10 Komputer, 8 Laptop, 2 mesin ketik	Perengkapan dan peralatan kantor selalu siap operasional/ pakai	10 Komputer, 8 Laptop, 2 mesin ketik	29.016	31.917		a
	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kendari			Tersedia Alat Tulis kantor dalam jumlah yang cukup	12 Bulan	Tersedia Alat Tulis kantor dalam jumlah yang cukup	12 Bulan	66.647	73.311		a
	7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kendari			Berbagai dokumen dapat dicetak dan digandakan	12 Bulan	Berbagai dokumen dapat dicetak dan digandakan	12 Bulan	81.385	89.523		a
	8. Penyediaan komponen instalasi listrik/Perangan Bangunan Kantor			Kendari			Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	11.495	12.645		a
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kendari			Tersedianya bahan bacaan Koran, majalah dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Tersedianya bahan bacaan Koran, majalah dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	10.628	11.691		a

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.000) Tahun 2018	Perkiraan Maju (Rp.000) Tahun 2019	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD 1 / 2 / 3	Jenis Kegiatan a / b / c
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman			Kendari			Tersedianya Snak bagi PNS, khususnya pada saat pertemuan/ rapat-rapat	12 Bulan	Tersedianya Snak bagi PNS, khususnya pada saat pertemuan/ rapat-rapat	12 Bulan	72.600	79.860		a
	11. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah			Kendari			Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Paket	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Paket	558.269	614.096		a
	12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kendari			Tersedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Tersedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-				a
	13. Jasa Administrasi Perkantoran			Kendari			Terbayarnya Jasa administrasi perkantoran	144 OB	Terbayarnya Jasa administrasi perkantoran	144 OB	175.208	192.729		a
	14. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD			Kendari			Tersusunnya laporan pertanggungjawaban SKPD	12 Bulan	Tersedia laporan pertanggungjawaban SKPD	12 Bulan	105.019	115.521		c3
	15. Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD			Kendari			Terpenuhiya Laporan Aset SKPD	12 Bulan	Tersedia Laporan Aset SKPD	12 Bulan	60.500	66.550		c3
2	01	02	01	2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur		Penyediaan sarana/prasarana penunjang kinerja guna pelaksanaan administrasi sarana perkantoran		Persentase pengadaan, pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana aparatur	100%				
					1. Pembangunan Rumah Dinas	Kendari, Kolaka, Muna, Konsel, Buton	Tersedia Rumah Dinas	1 Unit	Tersedia Rumah Dinas Bagi PNS	1 Unit	425.383	467.922		a
					2. Pembangunan Gedung Kantor	Kendari	Terbangun gedung kantor Dinas	1 Unit	Tersedia gedung kantor Dinas	1 Unit	660.000	726.000		a
					3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kendari	Tersedianya peralatan gedung kantor	15 Set/Unit	Tersedianya peralatan gedung kantor	15 Set/Unit	369.958	406.953		a
					4. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendari	Tersedia kendaraan Dinas R-4	1 Unit	Tersedia kendaraan Dinas R-4 Bagi Pejabat	1 Unit				a
					5. Pengadaan kendaraan R-2 Operasional	Kendari	Tersedia kendaraan Dinas R-2	4 Unit	Tersedia kendaraan Dinas R-2 bagi PNS	4 Unit	132.000	145.200		a
					6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kendari	Terpeliharanya gedung kantor	1 Dinas, 3 UPTD	Terpeliharanya gedung kantor	1 Dinas, 3 UPTD	66.000	72.600		a
					7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Kendari	Terpeliharanya kendaraan dinas kantor	11 Unit(4 unit R-4 dan 7 Unit Roda 2)	Terpelihara kendaraan dinas kantor	11 Unit(4 unit R-4 dan 7 Unit Roda 2)	137.359	151.095		a
					8. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Kab. Konsel	Terehabnya Rumah Dinas	1 Unit	Terehabnya Rumah Dinas	1 Unit	242.000	242.000		a

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.000) Tahun 2018	Perkiraan Maju (Rp.000) Tahun 2019	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD 1 / 2 / 3	Jenis Kegiatan a / b / c
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	9. Rehabilitasi sedang/berat rumah Gedung Kantor			Kendari, Kolaka, Muna, Konsel, Buton			Terehabnya gedung kantor	1 Unit	Terehabnya gedung kantor	1 Unit	390.000	390.000		a
	10. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor			UPTD			Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	10.000	10.000		a
	11 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gedung kantor			UPTD			Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	100.000	100.000		a
2	Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas		Meningkatnya disiplin aparatur	Kendari	Persentase pengadaan sarana peningkatan disiplin aparatur	100%	Tersedia Pakaian dinas (hansip dan keki)	260 Psng	Tersedia Pakaian dinas (hansip dan keki)	260 Psng	165.000	181.500		a
	2. Tersedianya Pakaian Adat Khas Daerah, dan Baju Olahraga						Tersedia Pakaian khas daerah dan baju olah raga	0	Tersedia Pakaian khas daerah dan baju olah raga	0				c2
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan/Latihan Non Formal		Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur	Kendari	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	23 Orang	Terikutinya Pelatihan Non Formal Bagi PNS	4 Org	PNS yang mengikuti pelatihan non formal	4 Org	32.200	32.200		a
	2. Pendidikan/latihan Struktural			Kendari			Terikutinya Pelatihan struktural	2 Org	PNS yang mengikuti pelatihan struktural	2 Org	-	-		a
2	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan LAKIP		Meningkatnya Kinerja SKPD & tersusunya dokumen renstra & Lakip	Kendari	Jumlah dokumen pelaporan tahunan	12 dokumen	Tersusunya Lakip SKPD	1 Dokumen	Tersusunya Lakip SKPD	1 Dokumen	5.000	5.000		a
	2. Penyusunan laporan keuangan akhir Tahun			Kendari			Tersusunya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	Tersusunya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	5.000	5.000		a
2	Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD 1. Penyusunan RENSTRA SKPD			Kendari	Jumlah dokumen perencanaan	8 dokumen	-	0	-	0	6.000	6.000		a
	2. Penyusunan RENJA			Kendari			Tersusunya Renja SKPD	1 Dokumen	Tersusunya Renja SKPD	1 Dokumen	5.000	5.000		a
2	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Prioritas 4 Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani serta bertambahnya jumlah lembaga	se Sultra se Sultra	Cakupan pembinaan petani/pelaku agribisnis terkait upaya peningkatan kesejahteraan petani	100%	Terlaksana pelatihan petani dan pelaku agribisnis	5 Kls	Bertambahnya pengetahuan petani dan pelaku agribisnis	5 Kls	384.000	384.000		a

Kode	Usuran/Bidang urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.000) Tahun 2018	Perkiraan Maju (Rp.000) Tahun 2019	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD 1 / 2 / 3	Jenis Kegiatan a / b / c
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2. Pemberian penghargaan kepada petani berprestasi		petani (LEM Sejahtera)	se Sultra			Terlaksananya Pemberian penghargaan kepada petani berprestasi	4 Org	Pemberian penghargaan kepada petani berprestasi	4 Org	156.000	156.000		a
	3. Pengukuhan dan pengembangan LEM Sejahtera			se Sultra			Terlaksananya Pengukuhan dan pengembangan LEM Sejahtera	5 LEM	Terbentuk kelembagaan LEM Sejahtera	5 LEM	100.000	100.000		a
	4. Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan petani dan pelaku agribisnis untuk penerapan teknologi baru			se Sultra			Terlaksana pelatihan petani dan pelaku agribisnis dalam mengapdosi teknologi baru dibidang perkebunan	1 Kls	pelatihan petani dan pelaku agribisnis	1 Kls	20.098	22.108		a
	5. Peningkatan kemampuan lembaga petani			se Sultra			Terlaksanan pertemuan Peningkatan kemampuan lembaga petani	5 Kls	Terlaksanan pertemuan Peningkatan kemampuan lembaga petani	5 Kls	318.000	349.800		c2
	6. Pelatihan petani peningkatan mutu kakao			se Sultra			Terlaksana Pelatihan petani peningkatan mutu kakao	10 kls	Terlaksana Pelatihan petani peningkatan mutu kakao	10 kls	200.000	200.000		c2
	7. Sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan			se Sultra			Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan	17 kls	Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan	17 kls	340.000	340.000		c2
	8. Monitoring dan Evaluasinya kegiatan			se Sultra			terkendalnya kegiatan melalui Monitoring dan Evaluasinya kegiatan	17 kab/Kota	terkendalnya kegiatan melalui Monitoring dan Evaluasinya kegiatan	17 kab/Kota	54.099	59.509		a

Kode	Usuran/Bidang urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.000) Tahun 2018	Perkiraan Maju (Rp.000) Tahun 2019	Keterangan					
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD 1 / 2 / 3	Jenis Kegiatan a / b / c				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
2	01	02	01	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan		Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan dan hortikultura	Kota Kendari	Jumlah kelompok yang menjadi percontohan pengembangan teknologi budidaya	9 Klp		Terpeliharanya taman kebun PKK Prov, Kebun PPID, Taman Anggrek, tersedia sumber benih tanaman perkebunan		Terpeliharanya taman kebun PKK Prov, Kebun PPID, Taman Anggrek, tersedia sumber benih tanaman perkebunan	0			a
					Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya													
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			se Sultra				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi program/ kegiatan		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi program/ kegiatan	0			a
2	01	02	01	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan		meningkatnya nilai tambah, daya saing produk perkebunan dan hortikultura di pasar domestik maupun internasional	Kendari	Jumlah promosi hasil produksi perkebunan dan hortikultura yang dilakukan	23 Kali		Terlaksana pameran dalam daerah dalam rangka HUT Sultra	1	Terlaksana pameran dalam daerah dalam rangka HUT Sultra	1 kali	56.700		a
					1. Pameran dalam daerah dalam rangka HUT Sultra			Kendari										a
					2. Pameran dalam daerah dalam rangka Ulang Tahun R.I			Kendari				Terlaksana pameran dalam daerah dalam rangka Ulang Tahun R.I	0	Terlaksana pameran dalam daerah dalam rangka Ulang Tahun R.I				a
					3. Pameran Luar Daerah Sulawesi Expo			Luar Provinsi				Terlaksana pameran Luar Daerah Sulawesi Expo	0	Terlaksana pameran Luar Daerah Sulawesi Expo	0			c3
					4. Pameran Luar Daerah Sulawesi Kemilau			Luar Provinsi				Terlaksana pameran Luar Daerah Sulawesi Kemilau	0	Terlaksana pameran Luar Daerah Sulawesi Kemilau	0			a
					5. Pameran Luar Daerah Hari Ketahanan Pangan			Luar Provinsi				Terlaksana pameran Luar daerah Sulawesi Kemilau	1 kali	Terlaksana pameran Luar daerah Sulawesi Kemilau	0			c3
					6. Pameran Pekan Flori dan Flora Nasional (PF2N)			Luar Provinsi				Terlaksana pameran Pekan Flori dan Flora Nasional (PF2N)	1 kali	Terlaksana pameran Pekan Flori dan Flora Nasional (PF2N)	0			a
					7. PameranThe 19th salon du Chocolate 2013/ pameran luar negeri			Luar Provinsi				Terlaksananya PameranThe 19th salon du Chocolate	1 kali	Terlaksananya PameranThe 19th salon du Chocolate	0			a

Kode	Usuran/Bidang urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.000) Tahun 2018	Perkiraan Maju (Rp.000) Tahun 2019	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD 1 / 2 / 3	Jenis Kegiatan a / b / c
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	8. Pameran Hari Kakao Nasional			Luar Provinsi			Terlaksana pameran Hari Kakao Nasional	1 kali	Terlaksana pameran Hari Kakao Nasional	0				a
	9. Gelar Agribisnis PENAS Petani			Luar Provinsi			Terlaksananya Gelar agribisnis PENAS Petani	1 kali	Terlaksananya Gelar agribisnis PENAS Petani	1 kali	100.000			a
	10. Promosi hasil-hasil perkebunan dan Hortikultura						Terlaksananya promosi hasil perkebunan dan hortikultura	1 Kali	Terlaksananya promosi hasil perkebunan dan hortikultura	1 Kali	200.000	200.000		c.3
	11. Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Masyarakat			Kab/Kota			Terlaksana pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/ Masyarakat	17 kab/Kota	Terlaksana pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/ Masyarakat	17 kab/Kota	79.638	87.602		c.3
2	01	02	01	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan Tepat Guna 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 2. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Pelatihan Petani Pengolahan Lahan Tanpa Bakar)		Meningkatnya pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana perkebunan dan hortikultura melalui pendekatan kemitraan	se Sultra se Sultra	Jumlah paket penyediaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	44 Paket				
							Tersedia Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	2 Pkt	Tersedia Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	2 Pkt	9.500	10.450		a
							Terlaksana Pelatihan Petani Pengolahan Lahan Tanpa Bakar	4 Kls	Terlaksana Pelatihan Petani Pengolahan Lahan Tanpa Bakar	4 Kls	100.000	100.000		a

Kode	Usuran/Bidang urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.000) Tahun 2018	Perkiraan Maju (Rp.000) Tahun 2019	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD 1 / 2 / 3	Jenis Kegiatan a / b / c
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	3. Agroindustri Pedesaan (pupuk organik, Agensia Hayati, Pengolahan Kakao, Kelapa, kopi dll)						Terlaksananya agroindustri di pedesaan (pupuk organik, Agensia Hayati, Pengolahan Kakao, Kelapa, kopi dll)	5 Paket	Terlaksananya agroindustri di pedesaan (pupuk organik, Agensia Hayati, Pengolahan Kakao, Kelapa, kopi dll)	5 Paket	500.000	500.000		c.3
	4. Pelatihan Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan Bercocok Tanam			se Sultra			Terlaksana pelatihan Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan Bercocok Tanam	4 Kls	Terlaksana pelatihan Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan Bercocok Tanam	4 Kls	100.000	100.000		a
2	01	02	01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan dan hortikultura	se Sultra	Jumlah Komoditas yang ditangani dalam rangka peningkatan produksinya	25 Komoditi				
					1. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan			se Sultra						
					2. Pembangunan kawasan agrowisata perkebunan dan hortikultura			se Sultra						
					3. Pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian/perkebunan			se Sultra						
					4. Pengadaan alat pasca panen pertanian/perkebunan			se Sultra						
					5. Penyuluhan Peningkatan produksi pertanian/perkebunan (GAP dan GHP Sayuran)			se Sultra						
							Terlaksananya Peremajaan, rehabilitasi dan Intensifikasi tanaman Perkebunan	6 Kab	Terlaksananya Peremajaan, rehabilitasi dan Intensifikasi tanaman Perkebunan	6 Kab	1.540.000	1.694.000		a
							Terbangunya kawasan agropolian perkebunan dan Hortikultura	13 Kab	Terbangunya kawasan agropolian perkebunan dan Hortikultura	13 Kab	1.430.000	1.573.000		a
							Tersedianya Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (Bibit, Pupuk, pestisida)	20 Paket	Tersedianya Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (Bibit, Pupuk, pestisida)	20 Paket	572.000	629.200		a
							Tersedianya Alat Pasca panen dan pengolahan Sagu	3 Paket	Tersedianya Alat Pasca panen dan pengolahan Sagu	3 Paket	200.000	200.000		a
							Tersedianya Kebun percontohan Hortikultura dan perkebunan	2 Paket	Tersedianya Kebun percontohan Hortikultura dan perkebunan	2 Paket	55.000	60.500		a

Kode	Usuran/Bidang urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.000) Tahun 2018	Perkiraan Maju (Rp.000) Tahun 2019	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD 1 / 2 / 3	Jenis Kegiatan a / b / c
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	6. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan			se Sultra			Tersedianya Bibit Unggul Perkebunan dan Hortikultura	55 Paket	Tersedianya Bibit Unggul Perkebunan dan Hortikultura	50 Paket	1.210.000	1.331.000		a
	7. Penyuluhan Peningkatan produksi pertanian/perkebunan (GAP/SOP Buah)			se Sultra			Tersedianya Kebun percontohan Hortikultura dan perkebunan -SL-GAP (Buah-Zan, Sayuran, tanaman hias, dan Biofarmaka)	13 Pkt	Tersedianya Kebun percontohan Hortikultura dan perkebunan -SL-GAP (Buah-Zan, Sayuran, tanaman hias, dan Biofarmaka)	13	130.000	130.000		a
	8. Pengendalian OPT Pertanian/ perkebunan			Konawe, Konse			Terkendalnya OPT Hortikultura secara ramah lingkungan (Pestisida Nabati dan Pupuk Organik)	2 Pkt	Terkendalnya OPT Hortikultura secara ramah lingkungan (Pestisida Nabati dan Pupuk Organik)	2 paket	143.000	143.000		a
	9. Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (SL-PHT)			Kab. Buton, Kolaka			Terlatihnya petani melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama terpadu (SL-PHT) Tanaman Perkebunan dan Hortikultura	0	Terlatihnya petani melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama terpadu (SL-PHT) Tanaman Perkebunan dan Hortikultura	0				a
	10. Pelatihan Petani pertanian/perkebunan			Kab. Konse, Konawe, Muna dan Butur			Terlatihnya petani dan petugas mendukung rehabilitasi, peremajaan dan Intensifikasi tanaman perkebunan dan Hortikultura	2 Kls	Terlatihnya petani dan petugas mendukung rehabilitasi, peremajaan dan Intensifikasi tanaman perkebunan dan Hortikultura	2 Kls	330.000	363.000		a
	11. Budidaya Jamur Tiram			se Sultra			Terlaksana budidaya jamur tiram	0	Terlaksana budidaya jamur tiram	0				c3

Kode	Usuran/Bidang urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.000) Tahun 2018	Perkiraan Maju (Rp.000) Tahun 2019	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD 1 / 2 / 3	Jenis Kegiatan a / b / c	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	12. Sosialisasi Undang-undang Perbenihan			kendari			Undang-undang perbenihan dapat dipahami oleh petugas kab./Kota	0	Undang-undang perbenihan dapat dipahami oleh petugas kab./Kota	0				c3	
	13. Pertemuan Koordinasi Pengembangan Kawasan Kakao Tingkat Provinsi			kendari			Terlaksana pengembangan kawasan kakao di prov. Sultra	0	Terlaksana pengembangan kawasan kakao di prov. Sultra	0				c3	
	14. Pertemuan Pengawasan Penanggulangan Gangguan Usaha Perkebunan			kendari			Terlaksanan penanggulangan gangguan usaha perkebunan	1 Kls	Terlaksanan penanggulangan gangguan usaha perkebunan	1 Kls	55.000	60.500		c3	
	15. Pertemuan Pengawasan Benih Perkebunan Ilegal			kendari			Terlaksanan pengawasan peredaran benih ilegal	0	Terlaksanan pengawasan peredaran benih ilegal	0				c3	
2	01	02	01	15	Pembangunan Jalan dan Jembatan 1. Pembangunan Jalan		Meningkatnya pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana perkabunan dan hortikultura melalui pendekatan kemitraan	-	Jumlah UPTD yang memiliki akses jalan permanen	3 UPTD	0	0	0	0	a
2	01	02	01	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan pengairan Lainnya 1. Pembangunan Jaringan Air bersih/air minum			-	Jumlah UPTD yang memiliki jaringan air bersih	2 UPTD	0	0	0	0	a
2	01	02	01	27	Program Pembangunan Infrastruktur jalan Pertanian 1. Pembangunan Jalan Produksi			-	Panjang Jalan Produksi	48,82 Km	-	-	-	-	a